

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Tribunnews.com
Media Cetak	

Ratusan Ribu Warga Jakarta Terima Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar dari Pemprov DKI

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Junianto Hamonangan

[Pemprov DKI Jakarta](#) terus melakukan pemadanan data kependudukan melalui webservice Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Pemadanan data secara berkala dilakukan agar bantuan sosial (bansos) yang diberikan bisa tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta [Premi Lasari](#) mengatakan, penyaluran bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) tahap satu telah dicairkan kepada pemegang tiga jenis kartu, yakni Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Pemadanan data tidak hanya dengan Kemendagri, tetapi dengan Kementerian Sosial, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta dan panti sosial.

"Penyaluran tahap dua akan dilaksanakan setelah proses pemadanan data secara berkala selesai.

Pemadanan dilakukan dengan data kependudukan Kemendagri, data kepemilikan aset di Bapenda, ketidaklayakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), hasil musyawarah kelurahan, ketidaklayakan SIKS-NG (Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation), panti sosial, verifikasi data calon penerima bansos PKD ke lapangan," kata Premi pada Jumat (21/6/2024).

Menurut dia, ada berbagai benefit yang diterima oleh program bansos itu.

Mulai dari bantuan Rp 300.000 per orang setiap bulan melalui Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank DKI, akses gratis menggunakan Transjakarta hingga akses subsidi pangan dengan harga murah.

"Untuk jumlah penerima bansos PKD ada 194.067 orang, rinciannya KLJ ada 149.549 orang; KPDJ ada 18.033 orang dan KAJ ada 26.485 orang," ujarnya.

Premi menambahkan, bansos PKD hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta yang tercatat dalam dokumen kependudukan dan berdomisili di wilayah setempat.

Hal ini sebagaimana Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Perlindungan Sosial.

"Warga di luar Provinsi DKI Jakarta tidak bisa mendapatkan bansos PKD," ungkapnya.

Premi mengatakan, bansos PKD tidak diusulkan melalui proses pendaftaran, tetapi dengan kriteria yang ditetapkan Pergub Nomor 44 Tahun 2022.

Selain itu, penerima bansos ini juga harus terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sebagaimana Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020.

"Calon penerima bansos PKD tahun 2024 yang diusulkan harus terdaftar DTKS penetapan bulan Februari 2022, November 2022, Januari 2023 dan Desember 2023 dengan status layak. Bagi yang belum terdaftar DTKS, saat ini Pemprov DKI belum melakukan pembukaan pendaftaran DTKS secara aktif," jelas Premi.

Dia memastikan, program bansos yang dikeluarkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat lewat Program Keluarga Harapan (PKH) tidak saling berhubungan.

Kedua program itu memiliki tujuan dan sasaran program yang berbeda.

"Namun pada tahun 2024 ini penerima bansos PKD tidak beririsan dengan penerima bansos PKH.

Penerima PKH juga tidak berhak mendapatkan bansos PKD, begitu pun sebaliknya penerima bansos PKD tidak berhak mendapatkansos PKH," imbuhnya. (faf)